

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi mengukur kinerja perekonomian suatu negara, wilayah, atau daerah. Menurut BPS, pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, dan memperluas jaringan ekonomi regional. Perencanaan pembangunan memiliki keterkaitan erat dengan ekonomi pembangunan. Jika ekonomi pembangunan berfokus pada pencarian strategi untuk mendorong pertumbuhan, maka perencanaan pembangunan berperan sebagai alat efektif dalam mengimplementasikan strategi tersebut melalui berbagai program yang tersusun secara sistematis. Koordinasi dalam pelaksanaan program ini penting agar tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, dapat dicapai dengan lebih efisien. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal.

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi regional, meskipun faktor ekonomi bukan satu-satunya penentu dalam proses pembangunan. Hingga saat ini, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetap menjadi tujuan utama dalam perencanaan pembangunan wilayah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terus berkembang secara bertahap. Kemampuan suatu daerah untuk berkembang sangat bergantung pada kontribusi berbagai sektor dalam perekonomiannya. Transformasi struktur ekonomi mencerminkan pergeseran dari aktivitas ekonomi tradisional menuju sistem ekonomi yang lebih

modern dan mengurangi ketergantungan supaya menuju arah kemandirian ekonomi lokal (Nurhab, 2019). Perubahan tersebut dapat dilihat dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2024, PDB Indonesia atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai 12.920.281,70 miliar rupiah yang tumbuh 5,03%. Pertumbuhan ini melambat dibanding tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dengan 18,98% dari total PDB diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,07% serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang 12,61%. Secara keseluruhan, kelompok provinsi di Pulau Jawa tetap menjadi motor utama perekonomian nasional yang menyumbang 57,02% dari total PDB. Menurut perkim.id, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan luas wilayah 32.544,02 km² atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Jawa Tengah menduduki peringkat keempat terbesar yang memberikan kontribusi PDRB terhadap PDB nasional pada tahun 2024. PDRB ADHK 2010 di Jawa Tengah tumbuh dari 1.102.473,58 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 1.157.025,94 miliar rupiah pada tahun 2024. Terdapat peningkatan sebesar 54.552,36 miliar rupiah. Hal ini didorong seiring dengan membaiknya situasi ekonomi global. Meningkatnya produksi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif sebesar 4,95 persen pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki peranan dan potensi yang besar bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara lengkap ranking kontribusi PDRB dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1. Ranking Kontribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di
Seluruh Provinsi Indonesia 2024

No.	Provinsi	PDRB ADHK Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)	Kontribusi	Ranking
1	DKI Jakarta	2.151.041,33	16,65%	1
2	Jawa Timur	1.935.810,15	14,98%	2
3	Jawa Barat	1.752.071,20	13,56%	3
4	Jawa Tengah	1.157.025,94	8,96%	4
5	Sumatera Utara	632.534,73	4,90%	5
6	Riau	571.233,59	4,42%	6
7	Kalimantan Timur	570.824,01	4,42%	7
8	Banten	531.735,25	4,12%	8
9	Sulawesi Selatan	396.141,74	3,07%	9
10	Sumatera Selatan	379.119,63	2,93%	10
11	Lampung	281.557,20	2,18%	11
12	Sulawesi Tengah	212.281,54	1,64%	12
13	Kep. Riau	209.939,07	1,62%	13
14	Sumatera Barat	199.407,38	1,54%	14
15	Jambi	176.906,50	1,37%	15
16	Bali	168.186,03	1,30%	16
17	Kalimantan Barat	162.574,47	1,26%	17
18	Kalimantan Selatan	156.756,94	1,21%	18
19	Aceh	153.780,44	1,19%	19
20	DI Yogyakarta	124.590,45	0,96%	20
21	Kalimantan Tengah	118.682,32	0,92%	21
22	Sulawesi Tenggara	113.989,49	0,88%	22
23	Nusa Tenggara Barat	109.414,97	0,85%	23
24	Sulawesi Utara	107.575,01	0,83%	24
25	Papua Tengah	105.471,48	0,82%	25
26	Nusa Tenggara Timur	78.044,57	0,60%	26
27	Kalimantan Utara	73.007,99	0,57%	27
28	Kep. Bangka Belitung	60.802,64	0,47%	28
29	Maluku Utara	55.152,33	0,43%	29
30	Bengkulu	54.454,65	0,42%	30
31	Papua	51.587,16	0,40%	31
32	Papua Barat	49.486,23	0,38%	32
33	Maluku	37.209,36	0,29%	33
34	Sulawesi Barat	37.088,07	0,29%	34
35	Gorontalo	32.949,62	0,26%	35
36	Papua Barat Daya	24.873,72	0,19%	36
37	Papua Selatan	18.963,85	0,15%	37
38	Papua Pegunungan	13.798,74	0,11%	38
	Indonesia	12.920.281,70	100,00%	

Sumber: bps.go.id PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 (diolah)

Secara geografis, Kabupaten Klaten berada di lokasi yang cukup strategis karena terletak di antara dua wilayah pertumbuhan ekonomi yakni Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Surakarta. Posisi ini menjadikan Kabupaten Klaten sebagai jalur penghubung aktivitas ekonomi antarwilayah, sekaligus dilintasi oleh koridor

perdagangan penting di Pulau Jawa. Keunggulan letak ini berpotensi mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, industri, pertanian, dan pariwisata yang turut memperkuat keterpaduan pasar tenaga kerja, konektivitas rantai pasok industri, serta efisiensi distribusi hasil-hasil pertanian (Ferdiansyah, 2022). Kabupaten Klaten juga memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pengembangan sektor-sektor potensial.

Klaten sebagai bagian dari kabupaten di Jawa Tengah yang mempunyai luas wilayah 701,52 Km² memiliki PDRB atas dasar harga konstan 2010 dari 31.938,33 miliar rupiah tahun 2023 menjadi 33.568,92 miliar rupiah pada tahun 2024. PDRB ini meningkat sebesar 1.630,59 miliar rupiah. Namun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2024 sebesar 5,11% mengalami penurunan yang cukup signifikan daripada tahun 2023 yaitu sebesar 5,70%. Jika pertumbuhan ekonomi Klaten dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2024, Kabupaten Klaten menempati urutan ke-15. Akan tetapi, PDRB Kabupaten Klaten masih menduduki peringkat 10 di antara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Tabel peringkat pertumbuhan ekonomi dan PDRB ADHK menurut kabupaten/kota se-Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1.2. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini menjadi fokus utama penelitian ini dilakukan supaya dapat menjadi diskusi bersama untuk pembangunan ekonomi lewat sektor-sektor potensi yang dimiliki Kabupaten Klaten. Data perbandingan PDRB di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah mencerminkan bahwa Klaten masih memiliki peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya.

Tabel 1.2. Ranking Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK

Tahun 2024 di Kab/Kota se-Jawa Tengah

No.	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Ranking	Kab/Kota	PDRB ADHK Lapangan Usaha (Miliar Rp)	Ranking
1	Kab. Batang	6,03	1	Kota Semarang	170.947,72	1
2	Kota Semarang	5,62	2	Kab. Cilacap	104.540,67	2
3	Kota Surakarta	5,61	3	Kab. Kudus	75.010,79	3
4	Kota Magelang	5,56	4	Kab. Banyumas	47.795,71	4
5	Kab. Karanganyar	5,54	5	Kota Surakarta	42.897,32	5
6	Kab. Kendal	5,42	6	Kab. Semarang	41.529,40	6
7	Kab. Grobogan	5,41	7	Kab. Brebes	38.546,98	7
8	Kab. Sragen	5,39	8	Kab. Kendal	37.201,45	8
9	Kota Salatiga	5,37	9	Kab. Pati	36.780,74	9
10	Kota Pekalongan	5,34	10	Kab. Klaten	33.568,92	10
11	Kab. Kebumen	5,3	11	Kab. Sukoharjo	32.187,41	11
12	Kab. Banyumas	5,29	12	Kab. Sragen	32.084,08	12
13	Kota Tegal	5,22	13	Kab. Karanganyar	31.883,10	13
14	Kab. Pati	5,13	14	Kab. Tegal	29.444,38	14
15	Kab. Banjarnegara	5,11	15	Kab. Boyolali	27.556,18	15
16	Kab. Klaten	5,11	15	Kab. Magelang	27.538,21	16
17	Kab. Pemalang	5,11	15	Kab. Jepara	25.482,07	17
18	Kab. Rembang	5,08	18	Kab. Wonogiri	24.728,69	18
19	Kab. Tegal	5,07	19	Kab. Kebumen	23.837,83	19
20	Kab. Demak	5,06	20	Kab. Grobogan	23.591,06	20
21	Kab. Magelang	5,06	20	Kab. Demak	21.894,60	21
22	Kab. Temanggung	5,04	22	Kab. Pemalang	21.778,06	22
23	Kab. Brebes	5,02	23	Kab. Purbalingga	20.422,61	23
24	Kab. Pekalongan	5,02	23	Kab. Blora	19.776,06	24
25	Kab. Sukoharjo	4,97	25	Kab. Pekalongan	19.283,06	25
26	Kab. Wonogiri	4,93	26	Kab. Batang	18.693,22	26
27	Kab. Purworejo	4,79	27	Kab. Banjarnegara	18.051,84	27
28	Kab. Semarang	4,73	28	Kab. Temanggung	17.855,60	28
29	Kab. Boyolali	4,64	29	Kab. Rembang	16.248,58	29
30	Kab. Wonosobo	4,57	30	Kab. Wonosobo	16.109,38	30
31	Kab. Purbalingga	4,55	31	Kab. Purworejo	15.745,98	31
32	Kab. Jepara	4,22	32	Kota Tegal	13.119,70	32
33	Kab. Blora	3,06	33	Kota Salatiga	11.505,05	33
34	Kab. Kudus	2,78	34	Kota Pekalongan	8.928,80	34
35	Kab. Cilacap	2,65	35	Kota Magelang	7.668,79	35
	35 Kab/Kota	4,95		Jawa Tengah	1.157.025,94	

Sumber: Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha 2024 (diolah)

Saat membicarakan soal perencanaan, sering kali muncul pertanyaan apakah suatu rencana bisa berjalan sesuai harapan atau justru gagal. Pertanyaan ini menjadi penting, apalagi ketika banyak kegagalan disebabkan oleh perencanaan yang keliru atau tidak tepat sasaran. Kesalahan semacam ini bisa terjadi sejak awal perencanaan atau muncul di tengah prosesnya. Tidak sedikit program pemerintah yang akhirnya tidak berhasil karena sejak awal tidak didasarkan pada kondisi sosial

dan budaya masyarakat setempat. Bahkan, program-program tersebut sering kali tidak membuat masyarakat menjadi mandiri, tetapi malah membuat mereka semakin bergantung pada bantuan pemerintah. Menurut Kuncoro (2018) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses kesinambungan yang mencakup keputusan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu.

Agar tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, perlu diidentifikasi sektor-sektor unggulan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Selain itu, tingkat pertumbuhan serta kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB juga menjadi aspek krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi regional mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki. Potensi sektor unggulan dapat diketahui dengan mengukur besaran kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB sebagai ukuran kinerja perekonomian daerah. Pemetaan potensi ekonomi bertujuan untuk mengetahui dan memprioritaskan potensi sektor-sektor unggulan ke dalam program perencanaan pembangunan daerah (Maspaitella & Parinussa, 2021).

Sebagai peneliti yang tumbuh besar dan berinteraksi langsung dengan dinamika ekonomi Kabupaten Klaten yang memanfaatkan *insider perspective*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pertumbuhan ekonomi Klaten ke depan. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengidentifikasi dan menganalisis potensi sektor unggulan di Kabupaten Klaten, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun program pembangunan daerah melalui sektor unggulan secara tepat dan efektif.

1.2. Perumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada Analisis Prospek Pengembangan Ekonomi Kabupaten Klaten Berbasis Potensi Sektor Unggulan Tahun 2019 – 2024:

- 1) Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten?
- 2) Apa saja potensi sektor unggulan di Kabupaten Klaten?
- 3) Bagaimana strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan potensi unggulan di Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Analisis Prospek Pengembangan Ekonomi Kabupaten Klaten Berbasis Potensi Sektor Unggulan Tahun 2019 – 2024 antara lain:

- 1) Untuk mengukur dan menganalisis pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten.
- 2) Untuk mengidentifikasi potensi sektor unggulan di Kabupaten Klaten.
- 3) Untuk memberikan strategi kebijakan ekonomi bagi pemerintah daerah di Kabupaten Klaten agar memaksimalkan potensi sektoral yang dimiliki.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian Analisis Prospek Pengembangan Ekonomi Kabupaten Klaten Berbasis Potensi Sektor Unggulan Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan gambaran pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan potensi unggulan di Kabupaten Klaten.
- 2) Memberikan rekomendasi strategi peningkatan dan pengembangan potensi sektorial di Kabupaten Klaten.

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencantumkan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini, uraian penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan beberapa beberapa metode analisis yang digunakan seperti *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share Analysis*, dan Analisis Tipologi Sektor.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang bersifat sistematis. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau bentuk lain. Dalam pembahasan, peneliti menjelaskan hasil penelitian yang terintegrasi dengan sajian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran (strategi) yang disusun secara terpisah. Kesimpulan dituliskan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan ditambahkan sektor-sektor potensial. Bagian saran memuat strategi-strategi yang telah dianalisis berdasarkan hasil pengukuran pada penelitian.

